



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Waena, Distrik Heram Kota Jayapura 99358
Situs www.ptun-jayapura.go.id, e-mail ptun.jayapura@gmail.com

Jayapura, 15 November 2024

Nomor : 1374/KPTUN.W8-TUN3/OT1.6/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Oktober 2024

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Di –

M A N A D O

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Bulan Oktober Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wakil Ketua,

MERNA CINTHYA

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN OKTOBER TAHUN 2024**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	16
1. Struktur Organisasi.	16
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	17
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	32
A. Kesimpulan.	32
B. Rekomendasi.	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	37
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01.	40
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05.	43
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	46

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	25
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	26
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	27
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 29.	Pegawai yang Mendapat Promosi/Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	28
Tabel 30.	Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 31.	Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Oktober secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 351/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP.I/III/2024 Tentang Penetapan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri

7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

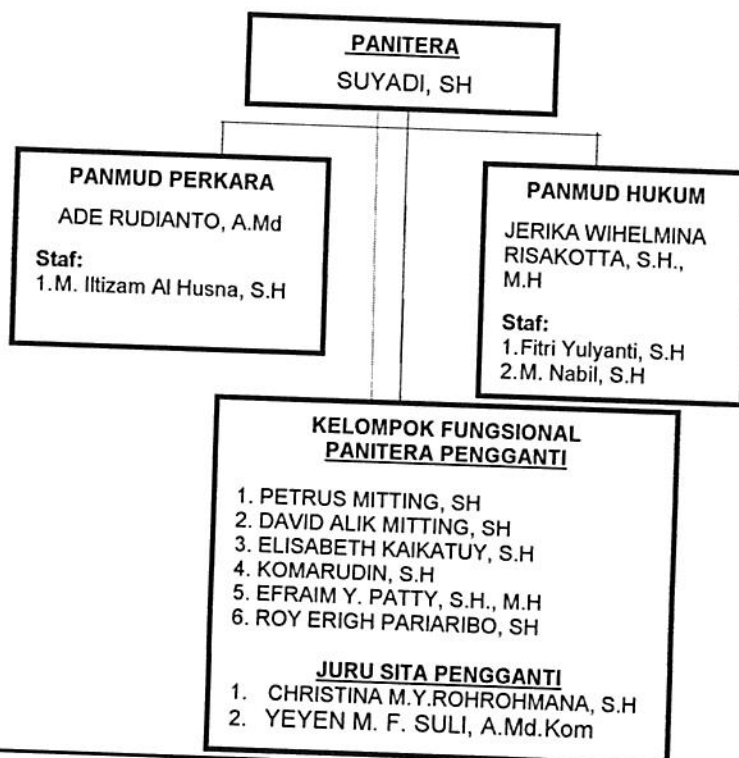
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. **Kepaniteraan Muda Perkara;** Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Oktober Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Oktober Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	7	3	2	8	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Oktober Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	6	1	7
2	Kepegawaian	1	-	1
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	-	-	-
Total		7	2	2
			3	10

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Oktober Tahun 2024

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	30,413,000	-	-	30,413,000
2	Penerimaan	-	7,090,500	-	7,090,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	358,000	358,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	736,000	736,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	1,500,000	1,500,000
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	410,000	410,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	3,769,000	3,769,000
9	Materai	-	-	40,000	40,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	190,000	190,000
	b. Redaksi	-	-	40,000	40,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	800,000	800,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	422,000	422,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	30,413,000	7,090,500	8,640,500	28,863,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Oktober Tahun 2024

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	7,186,500	-	-	7,186,500
2	Penerimaan	-	375,000	-	375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	275,000	275,000
	Jumlah	7,186,500	375,000	275,000	7,286,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Oktober Tahun 2024

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,556,000	-	-	1,556,000
2	Penerimaan	-	900,000	-	900,000
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	25,000	-
4	ATK Eksekusi	-	-	50,000	-
5	Materai	-	-	10,000	10,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	100,000	100,000
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	171,000	171,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	775,000	-
9	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,55,000	900,000	1,131,000	1,325,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.2.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Oktober Tahun 2024 adalah 70,59%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- e. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Oktober Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/110/OT.01.3/I/2023 tentang Standar Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBJEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Alvons Tebai, S.H.	3/10/2024	Salinan putusan 36/SP/2024/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
2	K.H Tergugat	25/10/2024	Salinan putusan 43,44,45/SP/2024/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
3	K.H Tergugat	25/10/2024	Salinan putusan 46,47,48/SP/2024/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan
4	K.H Tergugat	25/10/2024	Salinan putusan 49,50,51/SP/2024/PTUN.JPR	Mendapatkan Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan September 2024.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Husen M Abdullah	Konsultasi terkait penyerobotan tanah	1 Jam	-
2	Kumalasari	Konsultasi terkait harta waris	1 Jam	-
3	Marta S. Cendanawangi	Konsultasi terkait pengeroyokan	1 Jam	-
4	August Jaya Marani	Konsultasi terkait pengeroyokan	1 Jam	-
5	Dwi Sri Rahayu	Konsultasi terkait pelecehan	1 Jam	-
6	Supardi	Konsultasi terkait jual beli kendaraan	1 Jam	-
7	Martha L Korua	Konsultasi terkait sertifikat	1 Jam	-
8	Sissy Prisillia P.E	Konsultasi terkait pelecehan/penganiyaan	1 Jam	-
9	Robert Fransisko ayomi	Konsultasi hukum permintaan pendampingan atas kasus tindakan pidana pembunuhan	1 Jam	-
10	Sunarsih	Konsultasi hukum permintaan pendampingan terkait tindak pidana penipuan	1 Jam	-
11	H. Amir, SH. MH	Konsultasi hukum permintaan pendampingan terkait perceraian	1 Jam	
12	Muhammad Darwis	Konsultasi hukum terkait harta waris	1 Jam	

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

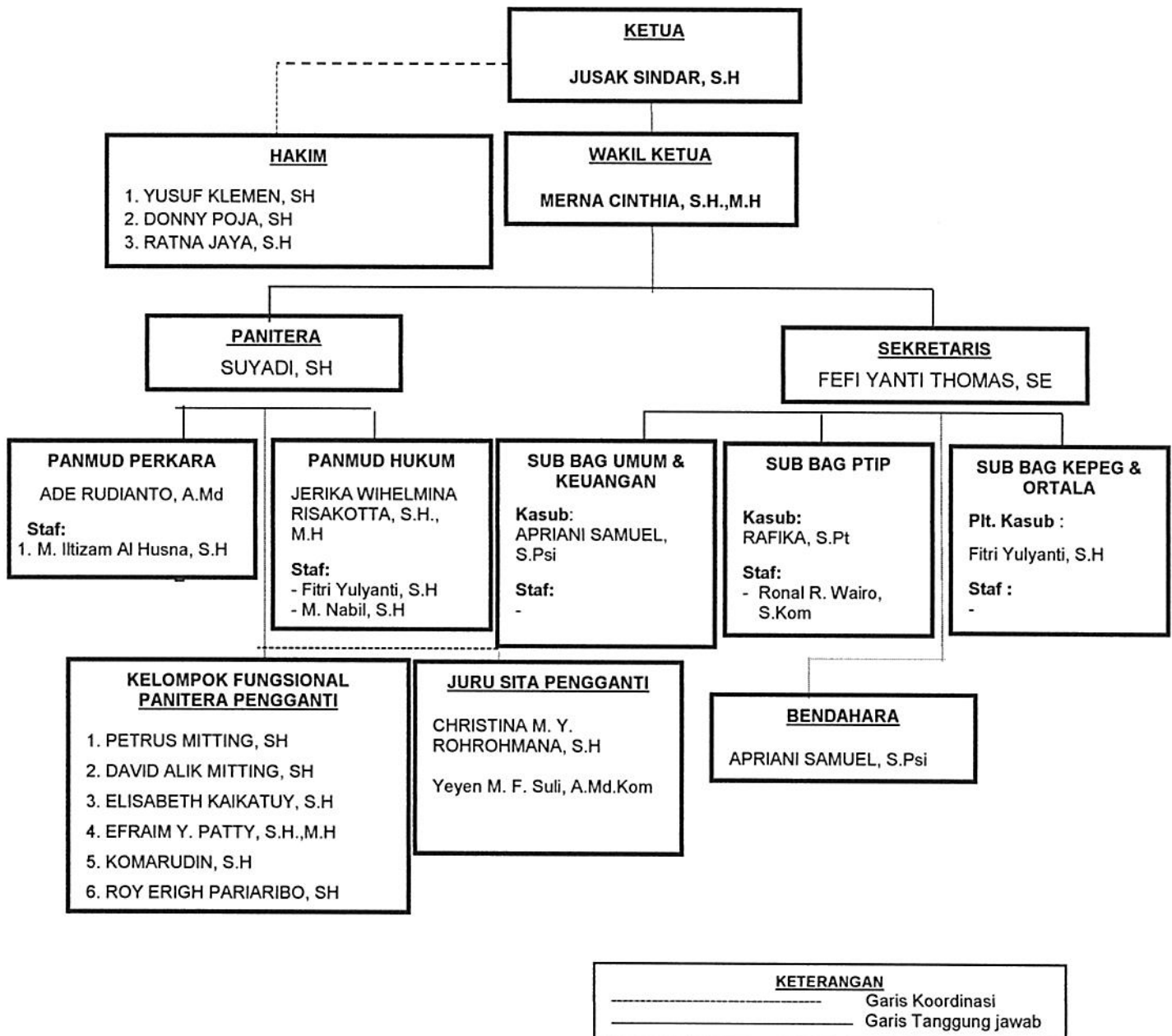
Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak. Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,805,122,000
Belanja Barang	1,901,332,000
Total	5,706,454,000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20,500,000
Pos Bantuan Hukum	33,000,000
Prodeo	96,670,000
Total	150,680,000

a. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3,797,872,000	269,091,111	3,158,669,962	639,202,038
2	Barang	1,901,332,000	117,857,016	1,586,703,977	312,858,023
3	Barang Non Operasional	7,250,000	-	7,250,000	-

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	150,680,000	4,068,000	139,403,240	11,276,760
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

b. Laporan PNB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Oktober Tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNB Bulan Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2,449,927	24,196,905
2	425232	Uang Meja (Leges)	390,000	1,650,000
3	425233	Ongkos Perkara	290,00	2,040,000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,572,500	7,212,500
		Total		35,099,405

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 2494 m2, halaman gedung 2000 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1993	700 m2	200 m2
2	B	1993		150 m2
3	C	1992	1100 m2	70 m2
4	C	1992		70 m2
5	C	1992		70 m2
6	C	1992		70 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	1659/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	1660/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	1661/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	1662/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	1663/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	1664/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	229/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/II/2024	APRIANI SAMUEL, S.Psi	KASUB UMUM & KEUANGAN	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4301 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
10	Honda	2008	DS 4518 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
12	Honda	2005	PA 4133 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	231/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/II/2024	FITRI YULYANTI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	Plt. Kasub Kepegawaian dan ORTALA
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
16	Honda	2007	PA 4396 DZ	Baik	1678/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	ADE RUDIANTO, A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	1673/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Genset	1	-	-
4	Sedan	1	-	-
5	Mini Bus	3	-	1
6	Sepeda Motor	8	-	9
7	Kursi Roda	1	-	-
8	Cermin Besar	2	-	3
9	Rak-rak Kayu	14	1	1
10	Lemari Besi	3	-	7
11	Lemari Kayu	30	6	8
12	Brankas	2	-	-
13	CCTV	1	-	-
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
15	Papan Pengumuman	-	1	-
16	White Board	1	-	1
17	LCD Projektor/Infocus	1	-	-
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50
20	Kursi Besi	29	4	44
21	Kursi Kayu	20	31	41
22	Sice	5	3	12
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
24	Meja komputer	-	1	3
25	Meja resepsionis	-	1	-
26	Sketsel	2	-	-
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14
28	Sofa	1	-	-
29	AC Split	21	-	15
30	Mixer	2	-	1

31	Televisi	3	-	6
32	Amplifire	2	1	-
33	Loudspeaker	6	-	8
34	Compact disk player	-	1	-
35	Tiang Bendera	4	1	1
36	Kaca Hias	1	-	1
37	Palu Sidang	2	-	1
38	Lambang Instansi	1	-	-
39	Handy Cam	1	-	-
40	Audio Mixing Console	1	-	-
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
42	UPS	7	-	-
43	Microphone cable	11	-	-
44	Camera Conference	1	-	-
45	Kursi Dorong	1	-	-
46	Walker Polding	2	-	-
47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
48	PC	25	4	13
49	Laptop	8	-	-
50	Notebook	9	6	5
51	Printer	6	6	16
52	scanner	2	-	2
53	server	1	-	1
54	router	1	-	1
55	Rak server	1	-	-
56	Alat Tenis Meja	-	1	-
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
60	Pagar permanen	1	-	-
61	Referensi	18	-	-

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/1423/PL.01.02/XII/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara Dengan Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan Diatas Rp. 100.000.000 per Unitnya pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KM.6/WKN.17/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung. Di mana memuat tentang persetujuan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa 11 (sebelas) unit tanah dan bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 22.475.280.544 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Penghapusan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat telah diproses lelang dan telah ada penetapan dari KPKNL Jayapura. Sementara penghapusan yang telah berjalan menunggu surat keputusan BUA MARI untuk selanjutnya

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan

Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Oktober Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	10	35
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	18	53
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	3	5
4	Kepaniteraan Perkara.	14	38
5	Kepaniteraan Hukum.	2	7

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Oktober 2024 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 24 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	
12.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
13.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
14.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
15.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
16.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
18.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	
19.	Juru sita Pengganti	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Juru sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala
23.	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	Panmud Perkara
24.	CPNS	M. Nabil, S.H	Panmud Hukum

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	Roy Erigh Pariaribo, S.H	III/d
12	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
13	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
14	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
15	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
16	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Juru Sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
22	Juru Sita Pengganti	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
23	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	III/a
24	CPNS	M. Nabil, S.H	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Bendahara Penerimaan
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Oktober mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tabel 29. Pegawai yang Mendapat Promosi/Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Jusak Sindar, S.H	Ketua PTUN Jayapura	Ketua PTUN Gorontalo
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil Ketua PTUN Jayapura	Ketua PTUN Jayapura
3	Yusuf Klemen, SH	Hakim PTUN Jayapura	Wakil Ketua PTUN Jayapura

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Oktober mengikuti Bimbingan Teknis ataupun Pelatihan yang diadakan oleh pihak terkait.

Tabel 30. Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMADIKLAT/BIMTEK	PELAKSANAAN
1	Yeyen M.F Suli, Amd. Kom	Jurusita pengganti	Pelatihan jarak jauh bendahara penerimaan	Pusdiklat keuangan

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Roy Erigh Pariaribo, S.H	Lengkap	-
13	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
14	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
15	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
16	Komarudin, SH	Lengkap	-
17	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-
23	M. Itizam Al Husna, S.H	Lengkap	-
24	M. Nabil, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Oktober Tahun 2024 dilakukan revisi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 kewenangan Eselon 1 dan revisi kewenangan kanwil DJPb. Revisi DIPA 05 Dirjen Badilmiltun dilakukan revisi kewenangan kanwil DJPb.

2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI11//2024 tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 300 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 200 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP, 50 Mbps untuk ruang sidang online dan 50 Mbps untuk ruang media center.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik ke depannya kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Perlu ditingkatkan juga pelatihan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih baik kedepannya.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang untuk kesekretariatan, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Kepegawaian Ortala dan Sub bagian yang lainnya tidak memiliki staf pelaksana.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 15 November 2024

WAKIL KETUA



MERNA CHINTYA

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		SISA DANA		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+7)	10	11=(4-9)	12	13
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA												
I	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	5,706,454,000	4,365,675,812	77%	386,948,127	6.78%	4,752,623,939	83%	953,830,061	16.71%	
	6986	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	6986.EBA.962	Layanan Umum	7,250,000	7,250,000	100%	0	0%	7,250,000	100%	0	0.00%	
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	7,250,000	7,250,000	100%	0	0%	7,250,000	100%	0	0.00%	
	6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	5,699,204,000	4,358,425,812	76%	386,948,127	7%	4,745,373,939	83%	953,830,061	16.74%	
	001	Gaji Dan Tunjangan	3,797,872,000	2,889,578,851	76%	269,091,111	7%	3,158,669,962	83%	639,202,038	16.83%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,901,332,000	1,468,846,961	77%	117,857,016	6%	1,586,703,977	83%	314,628,023	16.55%	
II	005.05.BF	PROGRAM PENEKAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	150,680,000	135,335,240	90%	4,068,000	2.70%	139,403,240	93%	11,276,760	7.48%	
	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara										
	1059.AEA.003	Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20,500,000	17,500,000	85%	1,250,000	6%	18,750,000	91%	1,750,000	8.54%	
	1059.BCA.001	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	510,000	129,000	25%		0%	129,000	25%	381,000	74.71%	
	1059.QBA.001	Pos Bantuan Hukum	33,000,000	21,732,000	66%	2,818,000	9%	24,550,000	74%	8,450,000	25.61%	
	1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara	96,670,000	95,974,240	99%		0%	95,974,240	99%	695,760	0.72%	
JUMLAH KESELURUHAN			5,857,134,000	4,501,011,052	77%	391,016,127	6.68%	4,892,027,179	83.52%	965,106,821	16.48%	
Jumlah Anggaran			Rp 5,857,134,000	Persentase								
Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA			Rp 4,892,027,179	83.52%								
Sisa Anggaran			Rp 965,106,821	16.48%								

Jayapura, 05 November 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PEFYANTI THOMAS, SE.
NIP. 19790310 200604 2 002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN OKTOBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
PROPOSISI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
NO. DIPAL TGL DIPAL : SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPAL TGL DIPAL REVISI : SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 18 MARET 2024, SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 APRIL 2024, SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPAL-005.01.2.539138/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 11 JULI 2024 REVISI KE-5 TANGGAL 16 OKTOBER 2024 REVISI KE-6 TANGGAL 21 OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
6986	6986	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
6986.EBA	6986.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
6986.EBA.962	6986.EBA.962	Layanan Umum										
051	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan										
A. 521219	A. 521219	Tes Urine bebas Narkoba (25 Orang x Rp 290.000)	7.250.000	7.250.000	100.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	7.250.000	7.250.000	100.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	0	0.00%	
6986.EBA.994	6986.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN										
001	001	Gaji dan Tunjangan										
A. 511111	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.339.326.000	1.042.239.380	77.82%	95.452.720	7.13%	1.137.692.100	84.95%	201.633.900	15.05%	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	13.846	60.20%	1.023	4.45%	14.869	64.65%	8.131	35.35%	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	94.255.000	70.271.670	74.55%	6.904.610	7.33%	77.176.280	81.88%	17.078.720	18.12%	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.081.000	24.796.054	68.72%	2.363.792	6.55%	27.159.846	75.27%	8.921.154	24.73%	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34.160.000	25.740.000	75.35%	2.340.000	6.85%	28.080.000	82.20%	6.080.000	17.80%	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.367.500.000	1.058.750.000	77.42%	97.080.000	7.10%	1.155.830.000	84.52%	211.670.000	15.48%	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	292.229.000	216.441.601	74.07%	15.429.826	5.28%	231.871.427	79.35%	60.357.573	20.65%	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	69.850.000	51.780.300	74.13%	4.852.140	6.95%	56.632.440	81.08%	13.217.560	18.92%	
511128	511128	Belanja Uang Makan PNS	187.310.000	132.396.000	70.68%	15.967.000	8.52%	148.353.000	79.20%	38.957.000	20.80%	
511138	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	202.343.000	148.985.000	73.63%	15.955.000	7.89%	164.940.000	81.52%	37.403.000	18.48%	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16.395.000	10.175.000	62.06%	745.000	4.54%	10.920.000	66.61%	5.475.000	33.39%	
511157	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	158.400.000	108.000.000	68.18%	12.000.000	7.58%	120.000.000	75.76%	38.400.000	24.24%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	3.797.872.000	2.889.578.851	76.08%	289.091.111	7.09%	3.158.669.962	83.17%	639.202.038	16.83%	
002	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
A. 521111	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	583.285.000	399.627.963	68.51%	45.291.315	7.76%	444.919.278	76.28%	138.365.722	23.72%	
521181	521181	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.100.000	67.594.495	92.47%	1.567.000	2.14%	69.161.495	94.61%	3.938.505	5.39%	
B. 521111	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	235.950.000	169.029.437	71.64%	18.564.502	7.87%	187.583.939	79.51%	48.356.061	20.49%	
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.660.000	5.448.700	56.40%	355.000	3.67%	5.803.700	60.08%	3.856.300	39.92%	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon	4.428.000	3.282.667	73.68%	324.136	7.32%	3.586.803	81.00%	841.197	19.00%	
522113	522113	Belanja Langganan Air	1.620.000	448.000	27.65%	0	0.00%	448.000	27.65%	1.172.000	72.35%	

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(7/4)	13
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	5.500,000	5.239,200	95,26%	0	0,00%	5.239,200	95,26%	260,800	4,7%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	506.700,000	497.713,503	98,23%	0	0,00%	497.713,503	98,23%	8.986,497	1,77%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56.713,000	56,700,000	99,98%	0	0,00%	56,700,000	99,98%	13,000	0,02%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.170,000	128,284,876	63,77%	11.255,553	5,60%	139.540,429	69,36%	61,629,571	30,64%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34.152,000	34,000,000	99,55%	0	0,00%	34,000,000	99,55%	152,000	0,45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56.712,000	27,456,000	48,41%	13,750,000	24,25%	41,206,000	72,86%	15,506,000	27,34%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.572,000	74,042,120	56,71%	26,749,510	20,49%	100,791,630	77,19%	29,780,370	22,81%	
	I. 524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,770,000			0	0,00%					
	JUMLAH KEGIATAN 0986.EBA.962		1,901,332,000	1,488,846,961	77,25%	117,857,016	6,20%	1,586,703,977	83,45%	312,858,023	16,45%	
	JUMLAH KESELURUHAN		5,708,454,000	4,365,675,812	76,50%	386,948,127	6,78%	4,752,623,939	83,29%	952,060,061	16,68%	

Jumlah Anggaran	5,708,454,000	Percentage
Realisasi Anggaran	4,752,623,939	83,29%
Sisa Anggaran	953,830,061	16,71%


 Jayapura, 05 November 2024
 Ketua Pengadilan Negeri Jayapura
 REF. ANTI THOMAS, SE.
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN OKTOBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
PROPOSISI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
NO. DIPAJ TGL DIPAJ : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPAJ TGL DIPAJ : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 18 MARET 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-3
NO. DIPAJ TGL DIPAJ : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 11 JULI 2024 REVISI KE-5 TANGGAL 16 OKTOBER 2024 REVISI KE-6 TANGGAL 21 OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJAA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%			
										3	4	
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	6986	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	6988.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
	6988.EBA.962	Layanan Umum										
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
	A. 521219	Tes Urine bebas Narkoba (25 Orang x Rp 290.000)	7.250.000	7.250.000	100.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	7.250.000	7.250.000	100.00%	0	0.00%	7.250.000	100.00%	0	0.00%	
	6988.EBA.984	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.339.326.000	1.042.239.380	77.82%	95.452.720	7.13%	1.137.692.100	84.95%	201.633.900	15.05%	
	511119	Belanja Gaji Pokok PNS	23.000	13.846	60.20%	1.023	4.45%	14.859	64.65%	8.131	35.35%	
	511121	Belanja Tunj. Suastiliseri PNS	94.255.000	70.271.670	74.55%	6.904.610	7.33%	77.176.280	81.88%	17.078.720	18.12%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.081.000	24.796.054	68.72%	2.353.792	6.55%	27.159.846	75.27%	8.921.154	24.73%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34.160.000	25.740.000	75.35%	2.340.000	6.85%	28.080.000	82.20%	6.080.000	17.80%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.367.500.000	1.058.750.000	77.42%	97.090.000	7.10%	1.155.830.000	84.52%	211.670.000	15.48%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	292.229.000	216.441.601	74.07%	15.429.926	5.28%	231.871.427	79.35%	60.357.573	20.65%	
	511126	Belanja Tunj. Beraas PNS	69.890.000	51.780.300	74.13%	4.892.140	6.95%	56.632.440	81.08%	13.217.560	18.92%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	187.310.000	132.386.000	70.68%	15.967.000	8.52%	148.353.000	79.20%	38.957.000	20.80%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	202.343.000	148.985.000	73.63%	15.955.000	7.89%	164.940.000	81.52%	37.403.000	18.48%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16.395.000	10.175.000	62.06%	745.000	4.54%	10.920.000	66.61%	5.475.000	33.39%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	158.400.000	108.000.000	68.18%	12.000.000	7.58%	120.000.000	75.75%	38.400.000	24.24%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	3.797.872.000	2.889.578.851	76.08%	269.091.111	7.09%	3.158.669.962	83.17%	639.202.038	16.83%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN										
	521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran	583.285.000	399.627.963	68.51%	45.291.315	7.76%	444.919.278	76.28%	138.365.722	23.72%	
		- Satepam (2 Org x 12 Bin)	102.144.000	68.096.000	66.67%	8.512.000	8.33%	76.608.000	75.00%	25.536.000	25.00%	
		- THR Satepam (2 Org x 1 Bin)	8.512.000	8.512.000	100.00%	0	0.00%	8.512.000	100.00%	0	0.00%	
		- Pengemudi (2 Org x 12 Bin)	102.144.000	68.096.000	66.67%	8.512.000	8.33%	76.608.000	75.00%	25.536.000	25.00%	
		- THR Pengemudi (2 Org x 1 Bin)	8.512.000	8.512.000	100.00%	0	0.00%	8.512.000	100.00%	0	0.00%	
		- Pramubakti (6 Org x 12 Bin)	278.568.000	185.712.000	66.67%	23.214.000	8.33%	208.926.000	75.00%	69.642.000	25.00%	
		- THR Pramubakti (6 Org x 1 Bin)	23.214.000	23.214.000	100.00%	0	0.00%	23.214.000	100.00%	0	0.00%	
		- Langganan Surat Kabar / Berita	9.000.000	6.750.000	75.00%	750.000	8.33%	7.500.000	83.33%	1.500.000	16.67%	
		- Biaya Perjalanan	1.520.000	844.000	42.37%	0	0.00%	644.000	42.37%	876.000	57.63%	
		- Air Minum / Galon	14.040.000	8.983.000	63.98%	1.398.000	9.96%	10.381.000	73.94%	3.659.000	26.06%	
		- Snack/Kudapan tamu (10 Org x 2 Hari x 5 Kg)	5.300.000	2.106.611	39.75%	785.315	14.82%	2.891.926	54.56%	2.408.074	45.44%	

[illegible]

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(3+7)	10=(9/4)	11=(4/3)	12=(11/4)	13
		- Transport Rili (2 ORG x 1 PP x 5 KEG)	3,986,000	150,000	3.75%	484,500	12.37%	644,500	16.13%	3,351,500	83.87%	
		- Penginapan (2 ORG x 2 HARI x 5 KEG)	30,144,000	15,958,800	52.94%	7,328,000	24.31%	23,286,800	77.25%	6,857,200	22.75%	
		- Uang Harian (2 ORG x 3 HARI x 5 KEG)	22,392,000	12,940,000	57.79%	3,840,000	17.15%	16,780,000	74.94%	5,612,000	25.06%	
		PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				0						
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,770,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,770,000	100.00%	
		- Paket Meeting Dalam Kota	1,350,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,350,000	100.00%	
		- Uang Harian (3 ORG X 1 KEG)	420,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	420,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1086.EAA.002	1,901,332,000	1,488,846,961	77.25%	117,867,016	6.20%	1,586,703,977	83.45%	312,868,023	16.45%	
		JUMLAH KESELURUHAN	5,706,464,000	4,385,876,812	76.80%	386,948,127	6.78%	4,752,623,939	83.29%	952,060,061	16.66%	

Jumlah Anggaran	5,706,464,000	Percentase
Realisasi Anggaran	4,752,623,939	83.29%
Sisa Anggaran	953,830,061	16.71%


 PENGADILAN TATA USAHA NEGERI
 Jayapura, 05 November 2024
 Kuasa Pengguna Anggaran
 FEFY SANTI THOMAS, SE.
 NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN OKTOBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROVINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPAL TGL DIPAL : SP DIPAL- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPAL TGL DIPAL REVISI : SP DIPAL- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 18 MARET 2024, SP DIPAL- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 23 APRIL 2024, SP DIPAL- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPAL- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 11 JULI 2024 REVISI KE-5 TANGGAL 16 OKTOBER 2024 REVISI KE-6 TANGGAL 21 OKTOBER 2024

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	% 6=(5/4)	TOTAL	% 8=(7/4)	TOTAL	% 10=(9/4)	TOTAL	% 12=(11/4)	
7	2	3	4	5		7				17=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan <i>Penyelesaian Perkara</i>										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	-Konsumsi Pengamanan Sidang (25 Org x 16 Kali)	20,500,000	17,500,000	85.37%	1,250,000	6.10%	18,750,000	91.46%	1,750,000	8.54%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.AEA	20,500,000	17,500,000	85.37%	1,250,000	6.10%	18,750,000	91.46%	1,750,000	8.54%	
II	1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521114	-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	360,000	9,000	2.50%		0.00%	9,000	2.50%	351,000	97.50%	
	A. 521211	- Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	150,000	120,000	80.00%		0.00%	120,000	80.00%	30,000	20.00%	

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
		JUMLAH KEGIATAN 1059.BCA	510,000	129,000	25.29%	0	0.00%	129,000	25.29%	381,000	74.71%	
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,532,000	60.29%	418,000	9.95%	2,950,000	70.24%	1,250,000	29.76%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultasi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bln)	28,800,000	19,200,000	66.67%	2,400,000	8.33%	21,600,000	75.00%	7,200,000	25.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	21,732,000	65.85%	2,818,000	8.54%	24,550,000	74.39%	8,450,000	25.61%	
IV	1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Sidang di luar Gedung Pengadilan										
	A. 522191	- Belanja Jasa (Biaya uang kebersihan)	300,000	300,000	100.00%		0.00%	300,000	100.00%	0	0.00%	
	524111	- Tiket (5 Org x 2 Keg)	37,007,000	36,312,000	98.12%		0.00%	36,312,000	98.12%	695,000	1.88%	
		- Transportasi (5 Org x 1 PP x 2 Keg)	7,200,000	7,200,000	100.00%		0.00%	7,200,000	100.00%	0	0.00%	
		- Penghinaan (5 Org x 2 Hari x 2 Keg)	25,823,000	25,822,240	100.00%		0.00%	25,822,240	100.00%	760	0.00%	
		- Uang Harian (5 Org x 3 Hari x 2 Keg)	26,340,000	26,340,000	100.00%		0.00%	26,340,000	100.00%	0	0.00%	
			96,670,000	95,974,240	99.28%	0	0.00%	95,974,240	99.28%	695,760	0.72%	
JUMLAH KESELURUHAN			150,680,000	135,335,240	89.82%	4,068,000	2.70%	139,403,240	92.52%	11,276,760	7.48%	

Jumlah Anggaran	150,680,000	Percentage
Realisasi Anggaran	139,403,240	92.52%
Sisa Anggaran	11,276,760	7.48%

Jayapura, 5 November 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

 FERYANTI THOMAS, SE

NIP.19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

HUN : 2024
 ILAN : Oktober
 MOR / TANGGAL DIP : [12.15, 31/1/2024] Christine: Yg 01 dan 05 [12.22, 31/1/2024] PTUN Pak. komar: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 31-01-2024
 PARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 IIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 OPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 TKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 PN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	165	10	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	23	30	Rp. 690.000	Rp. 690.000
		- Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	1	200	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		- Pendaftaran Permohonan Banding	13	50	Rp. 650.000	Rp. 650.000
		- Pendaftaran Permohonan Kasasi	10	50	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya				
		- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	3	10	Rp. 30.000	Rp. 30.000
		- Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	58	10	Rp. 580.000	Rp. 580.000
		- Surat Penyerahan Memori Banding	27	10	Rp. 270.000	Rp. 270.000
		- Redaksi Putusan/Penetapan	22	10	Rp. 220.000	Rp. 220.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	18	10	Rp. 180.000	Rp. 180.000
		- Surat Penyerahan Memori Kasasi	29	10	Rp. 290.000	Rp. 290.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	14	10	Rp. 140.000	Rp. 140.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	30	10	Rp. 300.000	Rp. 300.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	13	10	Rp. 130.000	Rp. 130.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	22	10	Rp. 220.000	Rp. 220.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	7	10	Rp. 70.000	Rp. 70.000
		- Pencabutan Gugatan/Permohonan	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
		- Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	9	10	Rp. 90.000	Rp. 90.000
		- Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	18	10	Rp. 180.000	Rp. 180.000
		- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10	10	Rp. 100.000	Rp. 100.000
		- Permohonan Pengawasan Eksekusi	5	25	Rp. 125.000	Rp. 125.000
		- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	20	10	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	5,335	500	Rp. 2.667.500	Rp. 2.667.500
		- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	28	10	Rp. 280.000	Rp. 280.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	25	10	Rp. 250.000	Rp. 250.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	26	10	Rp. 260.000	Rp. 260.000
		- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	27	10	Rp. 270.000	Rp. 270.000
JUMLAH I					Rp. 10.902.500	Rp. 10.902.500
JUMLAH I s/d I					Rp. 10.902.500	Rp. 10.902.500



Mengetahui
 Sekretaris
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Pet. Yanti Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

Jayapura, 1 November 2024
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

[Handwritten Signature]

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

AHUN : 2024
ULAN : Oktober
OMOR / TANGGAL DIPA : 112.15, 31/1/2024 Christine: Yg 01 dan 05 112.22, 31/1/2024 PTUN Pak. komar: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 31-01-2
EPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
NIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
ROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
ATER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PALAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan						
425232		Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 0	Rp. 1.260.000	Rp. 390.000	Rp. 1.650.000
425233		Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 0	Rp. 1.750.000	Rp. 290.000	Rp. 2.040.000
425239		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	Rp. 0	Rp. 5.640.000	Rp. 1.572.500	Rp. 7.212.500
JUMLAH I				Rp. 8.650.000	Rp. 2.252.500	Rp. 10.902.500
JUMLAH I s/d I				Rp. 0	Rp. 2.252.500	Rp. 10.902.500

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Pel. Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 1 November 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULANA ROHROHMANANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP

FORM 01

AHUN : 2024
ULAN : Oktober
IOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
EPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
INIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
ROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
ATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10	-	Rp. 24.196.905	Rp. 24.196.905
JUMLAH I					Rp. 24.196.905	Rp. 24.196.905
JUMLAH I s/d I					Rp. 24.196.905	Rp. 24.196.905



Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Pdt Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 1 November 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032005

TAHUN
BULAN
NOMOR / TANGGAL DIPA
DEPARTEMEN / LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
PROVINSI / KABUPATEN
SATKER
KPPN

: 2024
: Oktober
: SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
: MAHKAMAH AGUNG
: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
: Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
: JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PALAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN					
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 21.746.978	Rp. 2.449.927	Rp. 24.196.905
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 21.746.978	Rp. 2.449.927	Rp. 24.196.905
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 21.746.978	Rp. 2.449.927	Rp. 24.196.905

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA


Feli Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 1 November 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA


CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENJAJARAN TUGAS TATA USAHA NEGARA MAJAO
PENJAJARAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jl. Raya Sentani Wamena, Kel. Wamena Distrik Hutan Kota Jayapura Telp (0967) 574100
Email: kementerian@pjsn.jayapura.go.id Situs: www.pjsn-jayapura.go.id

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN OKTOBER TAHUN 2024

FORMULIR U-11

NO	HONOR PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	JUDUL KEJUWANTAHAN	DINUSUN				ACARA SINGKAT				ACARA BUKA/ACARA SERTA				SISA AKHIR		KETERANGAN
				TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	
1	116002487001 JPR	14-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. JUDAK SINDAR, SH
2	116002487001 JPR	01-07-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. YUSUP KIRWAN, SH
3	116002487001 JPR	16-07-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. BATHARYA, SH
4	116002487001 JPR	29-07-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. SUTADI, SH
5	116002487001 JPR	19-08-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. ADE RUSANTO
6	116002487001 JPR	21-08-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6. JERIKAW NIKAMOTTA, SH, MH
7	116002487001 JPR	21-08-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7. DAVID KUKINTING, SH
8	116002487001 JPR	02-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8. EUGENIE KAKATURY, SH
9	116002487001 JPR	02-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9. EFRAN NOSEPH PATRY, SH, MH
10	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10. KOWANOWA, SH
11	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11. ROYE PAMARINO, SH
12	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12. REZAKHILAH
13	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13. SIA BANTAN, SH
14	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14. MUDA BANTAN, SH
15	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15. DORNI
16	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16. SUTADI, SH
17	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17. SUTADI, SH
18	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18. SUTADI, SH
19	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19. SUTADI, SH
20	116002487001 JPR	20-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20. SUTADI, SH

Mengetahui:

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jayapura, 31 Oktober 2024

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN OKTOBER TAHUN 2024

Formulir LI - T2

JENIS PERKARA	PERKARA		PENGUGAT				TERGUGAT		PERLAWANAN			PUTUSAN				SISA PERKARA BULAN INI		Permohonan			Terima Berkas		KET.			
	SISA BULAN LALU	MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DISMISSAL	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBAL	EKSEKUSI	BANDING		KASASI	PENINJAUAN KEMBAL	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
JATIM	6	1	-	7	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
inahan	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
igawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
er/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
in Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ila Desa dan Perangkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ila Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
es Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
antuan Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
keja Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alaksanaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ikan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ikan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain	-	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
JMLAH	7	3	-	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	1	-	-	-	-	-	1	-

Mengetahui :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

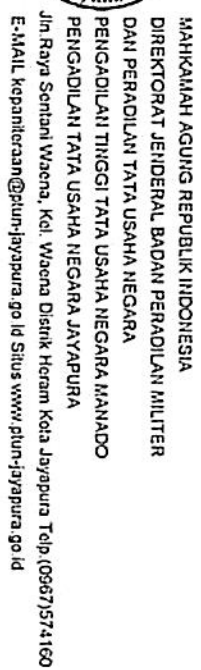
PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jayapura, 31 Oktober 2024

JUSAK SINDAR

SUPADI



**LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO
BULAN OKTOBER TAHUN 2024**

[illegible]

Mengetahui :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

Jayapura, 31 Oktober 2024

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SURFADL

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN OKTOBER 2024

CARA		TANGGAL	JASA	PEMBERI JASA	BANTUAN	BANTUAN	KETERANGAN
		02-10-2024	Husen M. Abdullah	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN SEJATI. Tlp. 082199812386, Jln Raya Abe Pantai Enggros Belakang Kantor Lurah Wai Mhorock, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi terkait penyerobotan tanah	
		04-10-2024	Kumalasari		Pemohon	Konsultasi terkait harta waris	
		07-10-2024	Marta S. Cendanawangi		Pemohon	Konsultasi terkait pengeroyokan	
		07-10-2024	August Jaya Marani		Pemohon	Konsultasi terkait pengeroyokan	
		10-10-2024	Dwi Sri Rahayu		Pemohon	Konsultasi terkait pelecehan	
		14-10-2024	Supardi		Pemohon	Konsultasi terkait jual beli kendaraan	
		16-10-2024	Martha L. Korta		Pemohon	Konsultasi terkait sertifikat	
		17-10-2024	Sissy Prisilia P. E		Pemohon	Konsultasi terkait Pelecehan/Penganiayaan	
		18-10-2024	Robert Fransisko Ayomi		Pemohon	Konsultasi terkait permintaan pendampingan	
		21-10-2024	Sunarsih		Pemohon	Konsultasi terkait permintaan pendampingan	
		28-10-2024	H. Amir, SH. MH		Pemohon	Konsultasi terkait permintaan pendampingan	
		31-10-2024	Muhammad Darwis		Pemohon	Konsultasi terkait harta waris	

Mengetahui:

KETUA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

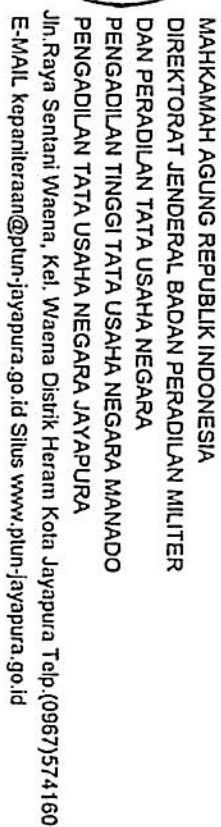
JUSAK SINGAR

Jayapura, 31 Oktober 2024

PANITERA

Pengadilan Tata Usaha Negara

SUYADI



LAPORAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN OKTOBER TAHUN 2024

Formulir L1-T5

[illegible]

Jayapura, 31 Oktober 2024

Mengelajahi :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

SUTYADI



LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN OKTOBER TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	30,413,000	-	-	30,413,000
2	Penerimaan	-	7,090,500	-	7,090,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	358,000	358,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	736,000	736,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	1,500,000	1,500,000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	410,000	410,000
8	Biaya Pengiriman	-	-	3,769,000	3,769,000
9	Materai	-	-	40,000	40,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	190,000	190,000
	b. Redaksi	-	-	40,000	40,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	800,500	800,500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	422,000	422,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	30,413,000	7,090,500	8,640,500	28,863,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	7,186,500	-	-	7,186,500
2	Penerimaan	-	375,000	-	375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	275,000	275,000
	Jumlah	7,186,500	375,000	275,000	7,286,500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,556,000	-	-	1,556,000
2	Penerimaan	-	900,000	-	900,000
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	25,000	-
4	ATK Eksekusi	-	-	50,000	-
5	Materai	-	-	10,000	10,000
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	100,000	100,000
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	171,000	171,000
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	775,000	-
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,556,000	900,000	1,131,000	1,325,000

Jayapura, 31 Oktober 2024

MENGETAHUI :

KETUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SOYADI



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI – WAENA – JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) – 571216
E-MAIL kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id SITUS www.ptun-jayapura.go.id

**BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
BENDAHARA PERKARA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A 1	Saldo Bulan Lalu	Rp	30.413.000	
2	Jumlah Penerimaan	Rp	7.090.500	
3	Jumlah Pengeluaran	Rp	8.640.500	
4	Saldo Pembukuan	Rp	28.863.000	
5	Saldo			Rp 28.863.000

II Saldo Menurut Kas , terdiri dari :

1	Uang Tunai	Rp	9.104.600	
2	Saldo Bank	Rp	19.758.400	
3	Surat Berharga	Rp	-	
4	Meterai	Rp	- (+)	
5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 28.863.000

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1	Uang Tunai di Brankas			
	Uang Kertas = 100.000 x 91 lbr	Rp	9.100.000	
	2.000 x 2 lbr	Rp	4.000	
	Uang Logam 5.00 x 1 Keping	Rp	500	
	100 x 1 Keping	Rp	100	
	Meterai -	Rp	- (+)	
	Jumlah			Rp 9.104.600

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1 Uang Tunai di Brankas

Uang Kertas = 100.000 x 13 lbr	Rp	1.300.000
20.000 x 1 lbr	Rp	20.000
5.000 x 1 lbr	Rp	5.000

Jumlah Rp 1.325.000

Yang diperiksa
Kasir Perkara

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Jayapura, 31 Oktober 2024

Pemeriksa
Panitera

SUDADI, S.H.
NIP. 197205151994031002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI – WAENA – JAYAPURA
TELEPON/FAKSMILI (0967) 574160(PTSP) – 571216
E-MAIL kepaniteraan@ptun-jayapura.go.id SITUS www.plun-jayapura.go.id

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN OKTOBER TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T8

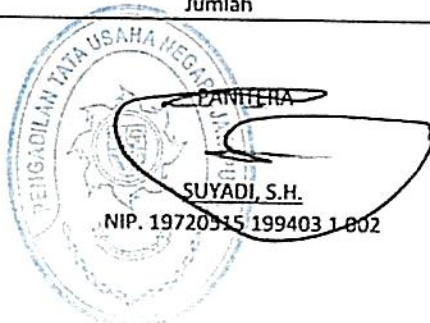
No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	30.413.000	-	-	30.413.000
2	Penerimaan		7.090.500	-	7.090.500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375.000	375.000
4	Biaya Panggilan	-	-	358.000	358.000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	736.000	736.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	1.500.000	1.500.000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	410.000	410.000
8	Biaya Pengiriman	-	-	3.769.000	3.769.000
9	Materai	-	-	40.000	40.000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	190.000	190.000
	b. Redaksi	-	-	40.000	40.000
	c. PNBP lain-lain	-	-	800.500	800.500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	422.000	422.000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	30.413.000	7.090.500	8.640.500	28.863.000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	7.186.500	-	-	7.186.500
2	Penerimaan		375.000	-	375.000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	275.000	275.000
	Jumlah	7.186.500	375.000	275.000	7.286.500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	1.556.000	-	-	1.556.000
2	Penerimaan	-	900.000	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi			25.000	
4	ATK Eksekusi			50.000	
5	Materai	-	-	10.000	10.000
6	Biaya Surat Panggilan			100.000	100.000
7	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	171.000	171.000
8	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi			775.000	
9	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
10	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
11	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
12	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1.556.000	900.000	1.131.000	1.325.000



Jayapura, 31 Oktober 2024

KASIR

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Kepada Yth. / To :

RPL 063 PDT PTUN JAYAPURA

JALAN RAYA SENTANI WAENA
Rt.001/001,Rt.001/001,KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan : 01/11/24
Statement Date

Periode Transaksi : 01/10/24 - 31/10/24
Transaction Period

No. Rekening : 214201000003307
Account No

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address JAYAPURA

Valuta : IDR
Currency

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
01/10/24 02:22:58	BFST214201000003307ONDI ABDILLA:CEHAIDJA 20241001CEHAIDJA01000264300896 ESB:BFST:0008N:20241001FASTIDJA01060286674	8888648	0.00	33,000.00	22,710,900.00
01/10/24 11:11:01	BRIVA19845493241000002NBMBKEPALA KANTOR BRIVA 19845493241000002NBMBKEPALA KANTOR ESB:NBMB:0200200P:741629341944	8888388	0.00	10,000.00	22,720,900.00
01/10/24 11:18:33	BRIVA19845493241000003NBMBKEPALA KANTOR BRIVA 19845493241000003NBMBKEPALA KANTOR ESB:NBMB:0200200P:741633809779	8888007	0.00	69,500.00	22,790,400.00
04/10/24 11:26:26	BFVA19845493241000004 HABEL RUMI:BMRIIDJA 20241004BMRIIDJA01000221880713 ESB:BFST:0008N:2024100444641991	8888634	0.00	865,000.00	23,655,400.00
06/10/24 09:49:44	BRIVA19845493241000006NBMBAGUSTINUS SH M BRIVA 19845493241000006NBMBAGUSTINUS SH ESB:NBMB:0200200P:743956506174	8888154	0.00	865,000.00	24,520,400.00
09/10/24 13:22:04	BFST214201000003307HOTMA BHASKA:BNINIDJA 20241009BNINIDJA01000236135746 ESB:BFST:0008N:20241009FASTIDJA01071986064	8888666	0.00	21,000.00	24,541,400.00
14/10/24 13:48:17	BFST214201000003307LEUMES PIET :BMRIIDJA 20241014BMRIIDJA01000225861035 ESB:BFST:0008N:20241014FASTIDJA01031307840	8888694	0.00	80,000.00	24,621,400.00
16/10/24 10:33:18	BRIVA19845493241000007NBMBFREDERIKA KORA BRIVA 19845493241000007NBMBFREDERIKA KOR ESB:NBMB:0200200P:748270049684	8888200	0.00	36,000.00	24,657,400.00
22/10/24 07:34:44	NBMB FITRIYATI TO RPL 063 PTUN JAYA ESB:NBMB:0001500F:750725145513	8888290	0.00	1,500,000.00	26,157,400.00
22/10/24 14:25:04	BFST214201000003307RANGGA AULIA:BNINIDJA 20241022BNINIDJA01000240250053 ESB:BFST:0008N:20241022FASTIDJA01071807145	8888677	0.00	14,000.00	26,171,400.00
22/10/24 19:25:06	BFST214201000003307JUNIYOR :BNINIDJA 20241022BNINIDJA01000221160573 ESB:BFST:0008N:20241022FASTIDJA01007268098	8888662	0.00	17,000.00	26,188,400.00



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
23/10/24 08:47:51	BRIVA19845493241000008NMBBGODTLIEF MANIS BRIVA 19845493241000008NMBBGODTLIEF MANIS ESB:NBMB:0200200P:751168924497	8888453	0.00	520,000.00	26,708,400.00
23/10/24 14:18:35	BRIVA19845493241000009NMBBGODTLIEF MANIS BRIVA 19845493241000009NMBBGODTLIEF MANIS ESB:NBMB:0200200P:751294836127	8888558	0.00	520,000.00	27,228,400.00
28/10/24 11:46:05	ESB:IHDS:0002A00W:0e902b14e78d	2142051	10,000,000.00	0.00	17,228,400.00
28/10/24 18:03:20	BFVA19845493241000010 LOTH KUNE:BMRIIDJA 20241028BMRIIDJA01000224623140 ESB:BFST:0008N:2024102831861686	8888606	0.00	865,000.00	18,093,400.00
31/10/24 12:57:55	BFVA19845493241000011 IGOR RENJ:BMRIIDJA 20241031BMRIIDJA01000226923389 ESB:BFST:0008N:2024103191581846	8888658	0.00	1,465,000.00	19,558,400.00
31/10/24 14:30:49	BRIVA19845493241000012NMBMBENTERI DALAM BRIVA 19845493241000012NMBMBENTERI DALAM ESB:NBMB:0200200P:754779073995	8888119	0.00	10,000.00	19,568,400.00
31/10/24 14:55:26	BRIVA19845493241000013NMBMBENTERI DALAM BRIVA 19845493241000013NMBMBENTERI DALAM ESB:NBMB:0200200P:754789960226	8888239	0.00	10,000.00	19,578,400.00
31/10/24 14:58:15	BRIVA19845493241000014NMBMBENTERI DALAM BRIVA 19845493241000014NMBMBENTERI DALAM ESB:NBMB:0200200P:754791205274	8888082	0.00	65,500.00	19,643,900.00
31/10/24 15:07:39	BRIVA19845493241000015NMBMBENTERI DALAM BRIVA 19845493241000015NMBMBENTERI DALAM ESB:NBMB:0200200P:754795394973	8888037	0.00	58,000.00	19,701,900.00
31/10/24 15:16:04	BRIVA19845493241000016NMBMBENTERI DALAM BRIVA 19845493241000016NMBMBENTERI DALAM ESB:NBMB:0200200P:754799098529	8888558	0.00	56,500.00	19,758,400.00
Saldo Awal Opening Balance		Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance	
22,677,900.00		10,000,000.00	7,080,500.00	19,758,400.00	

Terbilang / In Words

SEMBILAN BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
NINETEEN MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By BRISIM
11/01/2024 06:38:24 AM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
BULAN OKTOBER 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	% 6=(5/4)	TOTAL	% 8=(7/4)	TOTAL	% 10=(9/7)	TOTAL	% 12=(11/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,532,000	60.29%	418,000	9.95%	2,950,000	70.24%	1,250,000	29.76%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bn)	28,800,000	19,200,000	66.67%	2,400,000	8.33%	21,600,000	75.00%	7,200,000	25.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	21,732,000	65.85%	2,818,000	8.54%	24,550,000	74.39%	8,450,000	25.61%	

Jumlah Anggaran	33,000,000	Percentage
Realisasi Anggaran	24,550,000	74.39%
Sisa Anggaran	8,450,000	25.61%

Jayapura, 31 Oktober 2024
Ketua Renguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
FELIYANTI THOMAS, SE
NIP. 19790310 200604 2 002